



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN KOMISI III DPR-RI  
KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG, JAKARTA  
PADA MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2019-2020**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi III DPR RI sesuai dengan Konstitusi dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) memiliki kewenangan pengawasan; yang dalam hal ini pengawasan terhadap Sistem penegakan hukum yakni mengenali permasalahan utama over-kapasitas (*overcrowded*) di Berbagai Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan (LP/Rutan) di Indonesia. Salah satu yang mengalami over-kapasitas ini adalah LP Cipinang yang diduga mencapai 200-300 persen.

Penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia terus menghadapi kendala. Salah satu fenomena kegagalan dalam upaya menerapkan prinsip ini adalah over-kapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia atau yang lazim disebut dengan *overcrowded* yakni timpangnya jumlah Narapidana atau Tahanan dari jumlah Kapasitas LP/Rutan di Indonesia. Presiden dalam paket kebijakan reformasi hukum juga telah mengisyaratkan bahwa permasalahan over-kapasitas di lembaga pemasyarakatan ini menjadi salah satu fokus utama kebijakan hukum sebagai permasalahan yang harus segera dibenahi. Pemerintah, terutama melalui Menteri Hukum dan HAM, juga telah membuat berbagai program dan terobosan untuk merealisasikan paket kebijakan reformasi hukum tersebut, seperti pembangunan Lapas baru, melakukan manajemen pemindahan narapidana, pengawasan peredaran Narkotika dan barang terlarang lainnya secara lebih ketat, pembenahan berbagai regulasi penegakan hukum, dan berbagai kebijakan terkait dengan hak warga binaan atau narapidana melalui pembebasan bersyarat dan hak lainnya. Akan tetapi pada prakteknya, permasalahan over-kapasitas ini justru semakin hari semakin meningkat dan melebar. Permasalahan ini menunjukkan bahwa permasalahan penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya teratasi dan justru menimbulkan gejala atau permasalahan lanjutan.

Fenomena yang dapat kita temui di lapangan terkait dengan permasalahan over-kapasitas ini adalah seperti kerusakan dalam Lapas, banyaknya Napi yang kabur, permasalahan pengawasan peredaran Narkotika di dalam Lapas dan barang-barang terlarang lainnya, atau permasalahan kesehatan dan sosial di dalam Lapas. Dapat terlihat dari berbagai permasalahan tersebut yang merupakan efek samping atau dampak lanjutan

dari permasalahan over-kapasitas di Lapas, bahwa pentingnya reformasi di bidang penegakan hukum sebagai akar (*root*) atau inti (*core*) dari seluruh permasalahan yang terjadi. Salah satu problem utama yang perlu untuk segera dicari solusinya adalah dominasi angka penyalahguna Narkoba atau Narapidana/Tahanan Tindak Pidana Narkotika. Maka dalam rangka melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut di atas, perlunya juga dilakukan kunjungan spesifik secara langsung dalam rangka melihat data dan tipologi permasalahan yang terjadi secara regional.

## II. TUJUAN DAN OBJEK KUNJUNGAN LAPANGAN

1. Mencari data informasi, temuan, klarifikasi, dan masukan-masukan terkait mengenai fakta terkait dengan permasalahan over-kapasitas di LP Cipinang yang salah satu penyebab utamanya adalah inefisiensi dalam penanganan kasus TP Narkotika.
2. Melihat langsung dari seluruh upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh petugas dalam rangka profesionalitas dan memberikan hak-hak narapidana secara adil dan menyeluruh.

## III. SUSUNAN TIM

Tim Kunjungan Kerja ke LP Cipinang adalah sebagai berikut:

NAMA ANGGOTA	FRAKSI	KETERANGAN
Dr. Ir. Adies Kadir, SH, M.Hum	F P Golkar	Ketua Tim/ Pimpinan
Ahmad Sahroni	FP Nasdem	Pimpinan/ Anggota Tim
Arteria Dahlan	FPDIP	Anggota Tim
Marinus Gea	FPDIP	Anggota Tim
Ichsan Soelistio	FPDIP	Anggota Tim
M. Nurdin	FPDIP	Anggota Tim
Bambang DH	FPDIP	Anggota Tim
H. Andi Rio Idris Pajalangi, SH. M.Kn.	FPG	Anggota Tim
Supriansa, SH., MH.	FPG	Anggota Tim
Ir. Hj. Sari Yulianti, MT.	FPG	Anggota Tim

Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, M.Si	FPG	Anggota Tim
Romo H.R. Muhammad Syafii, SH., M.Hum.	FP Gerindra	Anggota Tim
Wihadi Wiyanto, SH, MH.	FP Gerindra	Anggota Tim
Taufik Basari, SH M.Hum, LLM.	FP Nasdem	Anggota Tim
H. Santoso, SH.	FPD	Anggota Tim
DR. Hinca IP Panjaitan XIII, SH, MH, ACCS.	FPD	Anggota Tim
Habib Aboe Bakar Al-Habsy, SE	FPKS	Anggota Tim
H. Nazaruddin Dek Gam	FPAN	Anggota Tim

Tim juga didampingi oleh Tim Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI.

#### **IV. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN LAPANGAN**

Waktu : Kamis, 16 Januari 2020.  
Tempat : LP Cipinang  
Acara : Sidak dan Tinjauan Langsung Ke LP Kelas II A  
Narkotika dan LP Kelas I Cipinang

#### **V. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN**

##### **V.1 LP KELAS IIA Narkotika**

1. Komisi III DPR melakukan pengawasan terhadap alat-alat, sarana, dan prasarana yang ada di LP Kelas IIA Narkotika. Dimulai dari adanya alat surveilance atau X-ray. Alat tersebut saat ini berjalan dan memiliki kemutakhiran dan lebih baik karena dapat melakukan pengecekan lebih mendetail. Namun kelemahannya masih belum terdapat A/C atau ruang pendingin yang lebih memadai.
2. Lalu tim melakukan pengecekan fasilitas kesehatan yang juga dapat melayani rawat inap. Fasilitas ini sudah memadai namun perlu untuk ditingkatkan agar pelayanannya lebih maksimal mengingat kapasitas terus bertambah.
3. Jumlah penghuni saat ini adalah 2649 orang atau kira-kira terjadi kelebihan kapasitas sekitar 312 persen dari jumlah kapasitas yang hanya 844 orang. Jumlah terpidana mati sekitar 6 orang (menunggu untuk eksekusi) dan 16 narapidana seumur hidup. Walaupun sama jenis hukuman, namun tetap dilakukan pemisahan agar interaksi dibatasi.
4. Tim selanjutnya mengunjungi blok isolasi atau mapenaling yang pada saat itu hanya berjumlah 8 kamar. Pimpinan mengingatkan agar blok

- isolasi yang banyak ini, sebagian dapat dikembangkan untuk membantu mengatasi over-kapasitas.
5. Namun ketika melakukan penelusuran terjadi ketidakseimbangan jumlah, karena ada yang satu sel berjumlah 5 orang, namun ada yang berjumlah 20 orang. Sel yang berjumlah 20 orang tersebut kemudian mengeluh bahwa mereka tidak bisa tidur secara normal atau harus bergantian, kondisi sangat sesak dan panas, dan mereka menilai tidak layak walaupun makanan tetap dirasa telah memadai.
  6. Tim kemudian mengunjungi Blok Rehabilitasi yang merupakan langkah screening dan detoksifikasi. Jumlah yang tercatat adalah 674 orang. Blok ini juga dilengkapi ruang agama dan perpustakaan. Khusus ruang perpustakaan adalah bagi mereka yang dinilai atau dianggap sudah bersih (Clear). Akan tetapi A/C tidak berfungsi demikian juga fasilitas telepon untuk komunikasi danantisipasi tidak berjalan. Blok ini memang bersifat khusus dan hanya dapat dikunjungi dari hari senin sampai dengan jumat.

## **V.2 LP Kelas I Cipinang**

1. Tim selanjutnya melakukan tinjauan ke LP Kelas I Cipinang yang masih berada dalam satu kawasan tersebut. Ruangan yang pertama adalah ruang registrasi dan pendaftaran untuk kunjungan. Selanjutnya dalam LP diawali dengan adanya body-scanning yang sudah lebih mutakhir dan bekerja.
2. Tim kemudian mengunjungi Blok A103 yang berkapasitas 3 orang sehingga sudah lebih baik. Salah satu perwakilan penghuni menyampaikan agar mohon fasilitas lain dapat didukung dan diperlakukan secara adil kepada seluruh penghuni. Sedangkan soal makanan dinilai telah layak dan baik.
3. Menyampaikan masukan agar fasilitas kesehatan yakni peningkatan kelas untuk Rumah Sakit karena kebutuhan yang semakin meningkat. Petugas dan perwakilan menyampaikan agar poliklinik yang ada dapat ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Type D, sedangkan Rumah Sakit Type D dapat ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Type C. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kapasitas dan kompleksitas penyakit yang ada. Selama ini biasanya dirujuk ke RSUD atau Klinik Pratama di LP yang lebih besar.
4. Usulan ini telah disampaikan ke Ditjen Pemasarakatan dan akan segera ditindaklanjuti. Namun terjadi kendala tentang syarat ahli spesialis. Hal ini menurut Kepala Bagian Kesehatan telah disampaikan pada Ditjen Pemasarakatan dan telah dicarikan solusi untuk sistem *outsourcing*.
5. Perwakilan dari penghuni juga menyampaikan bahwa perlunya perbaikan di level peraturan perundang-undangan yakni Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Pemasarakatan. Hal ini sangat perlu mengingat tidak seimbangnyajumlah penghuni yang masuk dan yang keluar dan menyebabkan kelebihan penghuni dan berbagai permasalahan. Oleh sebab itu harus ada kebijakan bersama terkait ppidanaan atau penegakan hukum yang lebih restoratif.

## **VI. KESIMPULAN**

Melihat dari seluruh hal-hal diatas, maka terdapat beberapa penekanan terhadap isu penting over-kapasitas yakni:

1. Narkoba masih menjadi permasalahan utama penyebab over-kapasitas di berbagai LP/Rutan. Dalam hal ini pentingnya perhatian dan dukungan anggaran dari Pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan ini.
2. Dukungan dari sisi regulasi, seperti perubahan UU Pemasarakatan, KUHP, dan seluruh kewenangan dan kelembagaan dalam Sistem Peradilan Pidana juga perlu diperhatikan setidaknya perbaikan untuk mengurangi over-kapasitas dan memperbaiki sistem pemidanaan.
3. Dukungan dibutuhkan untuk peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana mengingat saat ini terjadinya kelebihan penghuni, terutama fasilitas kesehatan.

Demikian laporan kunjungan lapangan ke LP Cipinang untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Januari 2020

**Ketua Tim Kunjungan Lapangan  
Komisi III DPR RI,  
Wakil Ketua,**

**Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.**